

Koordinasi Lintas Sektoral dan Lintas Instansi – Paling Sulit!

Presentasi di samping (milik Ibu Nina Sardjunani) menggambarkan tipologi layanan PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Dengan lima layanan yang terdapat di bawah naungan berbagai lembaga dan program, layanan tersebut ada yang lengkap dan tidak. Ada layanan yang terpadu dan tidak, serta kadang layanan berada di satu lokasi. Membuat semua layanan PAUD menjadi holistik dan integratif adalah rumit dan memakan waktu. Namun Pemerintah sudah siap menerima sebuah kompromi, yaitu layanan PAUD yang holistik dan integratif, namun tak harus di satu tempat. Pendekatan ini menerima kenyataan bahwa di lapangan, banyak instansi pemerintah harus memperhatikan banyak aspek, dengan berbagai lembaga berbeda dan kerangka kebijakan yang berbeda pula. Seringkali semuanya tak siap berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

Akan perlu waktu dan upaya untuk meraih integrasi seperti presentasi ke dua di sebelah kanan, dan semua pembicara pada acara TED pada bulan Januari kembali pada rekomendasi berikut:

“Aktifkan kembali fungsi koordinasi yang sudah ada, termasuk fungsi koordinasi internal” (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

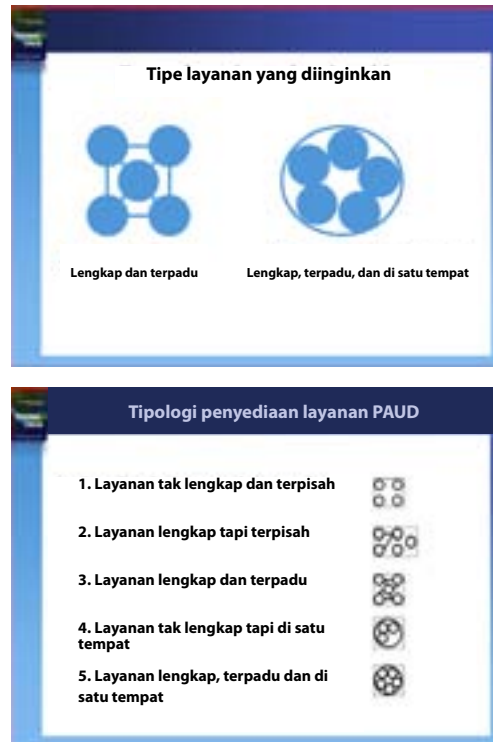
“Memperbaiki koordinasi antarsektoral dan memanfaatkan sebesar-besarnya keberadaan Puskesmas di tiap desa.” (Pusat Kajian Perlindungan Anak, Universitas Indonesia)

WAPIKWEB: Supermarket Daring (*online*) untuk Praktik yang Baik dalam Pendidikan



Sebuah jaringan informasi praktik yang baik: www.wapikweb.org adalah laman untuk berbagi contoh yang baik dalam sektor pendidikan di Indonesia, lihat rekaman layar.

Pada WAPIKWEB terdapat bagian tentang perkembangan anak usia dini, dengan fungsi pencarian berdasarkan kata kunci, agar mereka yang tertarik membuat perubahan dan memperbaiki pendidikan di sekolah, kabupaten atau wilayah masing-masing, dapat memperoleh informasi untuk membantu mereka. Laman ini disponsori oleh *Basic Education Capacity Trust Fund* dan merupakan koleksi kisah nyata, tips dan trik, modul dan ide, serta informasi kontak untuk praktisi.



“Memadukan pusat PAUD dan Puskesmas seperti contoh di Bangka Belitung, Gorontalo dan Kalimantan Tengah serta memonitor perkembangan mereka menggunakan satu alat monitoring bersama, yaitu buklet KIA.” (Kementerian Kesehatan).

KABAR PENDIDIKAN

EDISI 6
MARET 2012

Dalam edisi ini:

Fokus pada Kerangka Kebijakan untuk Perkembangan Anak Usia Dini

Kecenderungan pada Pengembangan Anak Usia Dini di Indonesia

Proyek Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini

Membandingkan sistem PAUD: Cina dan Australia

Berhubungan dengan Program Pengembangan Masyarakat

UNICEF: Mendukung Ujicoba Program dan Kebijakan untuk PAUD

Jawa Timur: Provinsi Berperan dalam Memperbaiki Layanan PAUD

Komitmen terhadap PAUD di Kabupaten Gorontalo

Koordinasi Lintas Sektoral dan Lintas Instansi – Paling Sulit!

WAPIKWEB: Supermarket Daring (*online*) untuk Praktik yang Baik dalam Pendidikan



Mengawali Kehidupan dengan Lebih Baik

Fokus pada Kerangka Kebijakan untuk Perkembangan Anak Usia Dini



Prof. dr. Fasli Jalal (UnAnd), Ibu Nina Sardjunani (Bappenas), Pak Slamet Riyadi (Kementerian Kesehatan), Pak Sudibyo (BKKBN).

Apakah bayi-bayi di Indonesia memiliki akta kelahiran? Apakah mereka mendapatkan air susu ibu (ASI)? Apakah mereka dan anak-anak usia 2-6 tahun mendapatkan gizi yang cukup, menerima imunisasi dan tidur di bawah kelambu? Apakah mereka memiliki akses pada air bersih dan sanitasi? Vitamin A? Jika mereka sakit, atau kurang gizi, apakah orang tua mereka membawa mereka ke dokter dan mereka bertahan hidup melewati masa bayi? Apakah anak usia 2-6 tahun bisa mengikuti program pendidikan anak usia dini?

Ini semua adalah pertanyaan yang ingin dijawab oleh Strategi Nasional untuk Perkembangan Anak Usia Dini (PAUD), menurut Ibu Nina Sardjunani, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas pada acara Dialog Tematik Pendidikan pada tanggal

16 Januari 2012 (yang didukung oleh *Basic Education Capacity Trust Fund*). Strategi ini dikembangkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak usia 0-6 tahun secara holistik dan terintegrasi, serta menempatkan anak sebagai pusat perhatian kebijakan Pemerintah.

Pemerintah bertekad bahwa 32,4 juta anak Indonesia harus menikmati manfaat dari kebijakan ini, demikian juga negara, karena Heckman telah menunjukkan bahwa investasi awal pada anak-anak memiliki manfaat paling besar dibandingkan dengan investasi pada kelompok usia lain.

Melaksanakan kebijakan di atas sangatlah menantang, karena sedapat mungkin layanan PAUD diberikan di bawah satu atap, serta layanan rujukan juga harus terintegrasi agar anak-anak dapat mengakses dukungan yang mereka perlukan. Perlu kerja keras ekstra untuk mengatasi tantangan berkaitan dengan anak-anak difabel. Kerangka hukum harus ditetapkan sederhana mungkin dan instansi serta lembaga pemerintah dan swasta harus bekerja sama, berbagai peran dan tanggung jawab dalam seluruh sistem.

Kecenderungan pada Pengembangan Anak Usia Dini di Indonesia

Bicara tentang urusan anak di Indonesia, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta adalah juaranya, demikian menurut Dr. dr. Slamet Riyadi, Direktur Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan. Berdasarkan survei nasional (RISKESDAS 2010), angka harapan hidup paling tinggi dan angka kematian bayi paling rendah terdapat di DI Yogyakarta, kemudian juga bayi lebih sering ditimbang dan kemungkinan besar mendapatkan Vitamin A. Para ibu di Yogyakarta juga mendapatkan fasilitas terbaik dan kunjungan paska kelahiran (*neonatal*) yang paling sering. Kementerian Kesehatan melaksanakan uji coba sistem lokal yang terintegrasi bagi PAUD di beberapa daerah.

(*parenting*), berkembang dari 100.000 kelompok pada tahun 2011 menjadi 140.000 pada tahun 2014, menurut Dr. Sudibyo Alimoeso dari BKKBN.

Prof. Irwanto dari Pusat Kajian Perlindungan Anak di Universitas Indonesia menegaskan pentingnya menilai kesiapan sekolah dan kebutuhan program PAUD untuk merangsang anak. Hal ini tak sekadar memastikan anak-anak bisa menulis dan berhitung pada usia lima tahun, tapi harus memastikan mereka sehat secara fisik, memiliki perkembangan sosial dan emosional yang baik, serta memiliki sikap belajar dan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi.

Program Bina Keluarga Balita mempromosikan kesejahteraan keluarga dan pengasuhan anak

WORLD BANK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building
Menara 2, Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
www.worldbank.org/id/education
www.wapikweb.org/bec

Tel: (62) 21. 52993000
Fax : (62) 21. 529931111
Email: stown@worldbank.org

Dicetak pada kertas daur ulang



Tahukah Anda..

49 persen dari anak Indonesia usia 5 tahun memiliki akses pada program PAUD

Indonesia memiliki lebih dari 90.000 Taman Kanak-Kanak



Foto: Fasli Jalal

Perkembangan Anak Usia Dini dalam aksi



Foto: Sally Brinkman

Mengadakan survei PAUD

Proyek Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini

Pemerintah Indonesia, dengan dukungan Bank Dunia melalui Proyek Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini dengan dana dari Pemerintah Kerajaan Belanda, mengelola proyek berskala besar yang bertujuan memperluas penyediaan layanan PAUD yang holistik-integratif, khususnya di daerah miskin. Proyek ini bekerja di 50 kabupaten sejak tahun 2006 dan sudah didirikan 6.000 pusat PAUD, menjangkau kurang lebih 500.000 anak dan menyediakan guru-guru yang terlatih. Proyek ini akan berakhir pada tahun 2013 dan diharapkan bahwa pada saat itu kabupaten telah mengambil alih untuk mendanai PAUD dan staf dari APBD.

Melalui proyek ini, Pemerintah berupaya memahami hal-hal apa yang berhasil dan tidak di PAUD, serta mengapa hal-hal tersebut berhasil atau tidak. Pemerintah juga berusaha memahami biaya dan manfaat layanan PAUD, serta mendapatkan solusi yang terbaik. Dengan informasi

dari 310 desa dan 9 kabupaten di seluruh Indonesia, studi awal menemukan bahwa anak Indonesia adalah komunikator yang handal dan memiliki pengetahuan umum yang baik, namun perkembangan kognitif dan bahasa mereka kurang, ditambah dengan lebih dari separuh anak tidak memiliki buku di rumahnya. Anak-anak lebih sering menyanyi, menari dan bermain musik, dibandingkan membaca dan mendengarkan cerita.

Setelah survei putaran ke dua pada tahun 2011, hasil studi merekomendasikan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan meningkatkan hubungan dengan Puskesmas untuk mencegah pertumbuhan terhambat (*stunting*) dan masalah kesehatan lain. Studi tersebut juga menemukan bahwa anak-anak yang ikut PAUD berkembang lebih pesat dari yang tidak ikut, khususnya pada bidang bahasa dan kognitif.

Membandingkan sistem PAUD: Cina dan Australia

Pemerintah Cina dan Australia membagi pengalaman mereka tentang PAUD pada seminar yang diadakan Pemerintah Cina di Beijing yang dihadiri oleh Prof. Fasli Jalal. Beliau berbagi pelajaran dari seminar ini untuk Indonesia.

Pemerintah Cina mempertimbangkan untuk meluaskan layanan PAUD, setelah menyadari bahwa anak-anak di pedesaan dan kaum minoritas kecil kemungkinannya untuk dapat mengikuti PAUD. Pentingnya pola pengasuhan anak yang baik, pemeriksaan kesehatan dan gizi juga disadari, sehingga mereka sedang mengembangkan sebuah kebijakan yang akan menyediakan layanan gratis bagi perempuan miskin dan pedesaan untuk mengatasi persoalan di atas, dengan fokus pada anak usia 0-3 tahun. Hal ini memerlukan transfer dari pusat ke wilayah, serta program masyarakat dan program berbasis rumah (*home-based*) yang baik.

Berhubungan dengan Program Pengembangan Masyarakat

PNPM Generasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Bank Dunia adalah program pemberdayaan masyarakat terdepan di Indonesia. Melalui suatu kombinasi perencanaan masyarakat partisipatif dan hibah utuh (*block grants*), PNPM Generasi menjadi wahana sukses untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat akan peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pada pendidikan dasar dan menengah. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun PNPM Generasi berhasil menumbuhkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar, masyarakat makin tertarik pada perluasan layanan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD – *Early Childhood Education and Development*, ECED). Hal tersebut termasuk pendidikan tentang pola pengasuhan (*parental education*) dan layanan konseling

perbaikan gizi melalui Posyandu. Mengaitkan PAUD dengan Program PNPM Generasi berpotensi menyediakan sumber yang lebih baik bagi masyarakat untuk memasukkan anak-anak kurang mampu ke layanan PAUD. Selain itu, dapat terus dibangun kapasitas daerah untuk menyediakan dukunga profesional bagi para guru serta menguatkan kapasitas pemerintah lokal dan komitmen anggaran untuk memperluas layanan PAUD holistik-integratif. Kerja sama di antara kedua program tersebut akan memperkuat sisi permintaan (PNPM Generasi) dan suplai (PAUD) serta program penguatan kapasitas kabupaten tambahan akan membantu menghubungkan kedua program tersebut, memaksimalkan penyediaan layanan yang holistik dan meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan tersebut.

UNICEF: Mendukung Ujicoba Program dan Kebijakan untuk PAUD



UNICEF mendukung ujicoba program PAUD di 23 kabupaten, menjangkau 22.000 anak di bawah usia enam tahun. Program tersebut menyertakan praktik yang baik dari BKKBN, antara lain program pola pengasuhan anak, layanan gizi dan kesehatan melalui Puskesmas setempat dan pengembangan psikososial melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UNICEF telah mengembangkan modul untuk mendukung pelatihan bagi pekerja masyarakat setempat dan pengasuh (*caregivers*) serta mengembangkan alat komunikasi yang dapat membantu advokasi pendekatan PAUD. Bupati di Aceh Besar, Sukabumi, Wonosobo, Kupang, Banyumas, Sikka dan Belu telah mendukung program ini secara resmi, begitu pula dengan provinsi Jawa Timur. Masih banyak wilayah lain yang sedang merancang peraturan untuk mendukung PAUD.

Melalui kerja sama dengan beberapa Kementerian, UNICEF juga mendukung pengembangan kebijakan dan petunjuk operasional PAUD. UNICEF sedang berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah dan kelompok swadaya masyarakat (*community-based organizations*) agar dapat menyediakan pengembangan anak usia dini yang holistik, serta memperkuat legislasi dan melakukan advokasi untuk meningkatkan alokasi anggaran guna mendorong kesiapan anak bawah tujuh tahun untuk sekolah. Bersama Bappenas, UNICEF mendukung petunjuk penganggaran PAUD. Bersama Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, UNICEF mengembangkan instruksi presiden tentang tumbuh kembang anak, sehingga seluruh Kementerian mengembangkan rencana tahunan dan alokasi anggaran yang selaras dengan strategi PAUD nasional. Hal-hal tersebut akan memastikan bahwa semua anak terjamin haknya untuk mendapatkan pengembangan anak usia dini.

Komitmen terhadap PAUD di Kabupaten Gorontalo

Di Sulawesi bagian Utara, Kabupaten Gorontalo memimpin reformasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan di bawah pimpinan Bupati mereka, David Babihoe. PAUD telah masuk dalam APBD mereka sejak tahun 2007 (sebagai dana pendamping Proyek PAUD dukungan Bank Dunia) dan menggunakan peraturan Bupati yang sudah ada untuk semakin mendukung sistem PAUD yang kuat. Sejak tahun 2007, jumlah pusat PAUD nonformal telah berlipat ganda menjadi 335 dan jumlah pusat PAUD formal meningkat dari 157 menjadi 197. Ada 11.260 anak yang dapat bergabung pada berbagai pusat PAUD tersebut.

Puskesmas, klinik dan pusat PAUD bekerjasama di bawah payung Forum PAUD untuk menyediakan layanan yang lebih baik bagi anak-anak usia 0-6 tahun. Hal tersebut termasuk berbagai program pemeriksaan kesehatan rutin, kegiatan belajar dan bermain yang terpusat pada anak dan tips untuk memperbaiki gizi. Pendekatan yang holistik integratif tersebut juga meliputi program pola pengasuhan dan kunjungan rumah oleh dokter.

Pusat-pusat PAUD juga terhubung dengan program PNPM nasional dan dana masyarakat sekarang telah digunakan untuk membangun pusat PAUD baru di daerah pedesaan.

Jawa Timur: Provinsi Berperan dalam Memperbaiki Layanan PAUD

Dengan penduduk sejumlah 37,5 juta jiwa dan 4 juta di antaranya berusia 0-6 tahun, 68 persen dari anak-anak di Jawa Timur tidak memiliki akses pada PAUD. Kepemimpinan yang kuat pada tingkat provinsi oleh istri Gubernur, Ibu Nina Soekarwo, yang bekerja melalui PKK, membantu mempercepat ekspansi PAUD. Hal ini terjadi berkat berbagai macam advokasi, kampanye informasi umum dan rapat koordinasi untuk meningkatkan antusiasme dan komitmen di seluruh provinsi.

Pada tahun 2012, program PKK akan fokus pada bekerjasama dengan pusat-pusat PAUD yang ada untuk memastikan bahwa mereka terhubung dengan baik dengan Puskesmas, memiliki akses terhadap relawan PKK dan dapat menawarkan layanan holistik bagi anak-anak mulai usia tiga bulan (layanan ditawarkan untuk anak usia 0-3 tahun dan 4-5 tahun). Program PKK juga akan membantu mendapatkan dana dari sumber setempat, agar mainan dan alat belajar dapat terus diadakan. Bersama lembaga setempat, mereka juga akan mengembangkan program kegiatan seputar pola pengasuhan, kesehatan dan gizi, serta pendidikan.



Kelompok PKK memiliki peran dalam mendukung PAUD di Jawa Timur.

Foto: Nina Soekarwo



Pemeriksaan kesehatan untuk bayi pada kegiatan Forum PAUD di Kabupaten Gorontalo, menuju penduduk yang "cerdas, sehat, kreatif, sadar lingkungan, sejahtera dan mandiri".